Dosen:
DR. ANDI HARTAWATI, S.H., M.H

HUKUM PAJAK

Hubungannya Dengan Hukum Perdata Dan Pidana

ABDUL HARIS
NPM: 2022060042
PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

slidesmania.com

ISTILAH SINONIM

Yang berkaitan dengan Perpajakan

Barang Kena Pajak (BKP), Jasa Kena Pajak (JKP), Pengusaha Kena Pajak (PKP),
Masa pajak, Wajib Pajak, Surat Setoran Pajak (SSP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),

slidesmania.com

ISTILAH PAJAK DALAM ISLAM

- Dharibah, merupakan Istilah pajak dalam Islam,
- Zakat, merupakan sumbangan yang menjadi keharusan seorang Muslim, untuk muslim lainnya.
- Al Usyr – Al Maks, merupakan istilah pajak yang berlaku pada seseorang atas penghasilannya,
- Kharaj, yakni pajak bumi yang menjadi kewajiban Rakyat Non Muslim, yang memiliki tanah pada sebuah negara Islam,
- Jizyah, adalah upety dari penduduk Non Muslim kepada Negara sebagai pengganti kewajiban militer untuk perlindungan dan keamanan.

slidesmania.com

definisi HUKUM PAJAK

Santoso Brotodihardjo, Analisa yang ternarasikan oleh Santoso Brotodihardjo, menjelaskan bahwa hukum perpajakan atau yang juga kita kenal sebagai hukum fiskal. Sebagaimana ini merupakan aturan-aturan yang mencakup wewenang ataupun hak pemerintah. Dalam mengambil atau menarik hak negara dari kekayaan seseorang dan memberikannya kembali kepada rakyat atau masyarakat melalui kas negara.

slidesmania.com

definisi HUKUM PAJAK

- **Bohari,** Pendapat senada juga diutarakan oleh Bohari. Menurutnya, hukum pajak merupakan kumpulan peraturan perundang-undangan. Yang mengatur rakyat selaku pihak yang membayar pajak dengan pemerintah selaku pemungut pajak.

slidesmania.com

definisi HUKUM PAJAK

- **Rachmat Soemitro,** Selanjutnya, Rachmat Soemitro memberikan arti hukum fiskal adalah kumpulan peraturan dengan mengatur hubungan antara rakyat selaku yang akan pembayar pajak kepada pemerintah selaku penerima (pemungut) pajak.
- **Erly Suandy,** Pakar lain yang memberikan pemaknaan adalah Erly Suandy. Dia mengungkapkan bahwa hukum fiskal merupakan bagian dari sebuah hukum publik mengatur korelasi antara rakyat sebagai wajib pajak dengan penguasa maupun pemerintah selaku penerima (pemungut) pajak.

slidesmania.com

01

Hukum Pajak Formil

Hukum perpajakan formil merupakan aturan (hukum) yang memuat berbagai prosedur untuk mewujudkan segala bentuk hukum perpajakan materiil. Untuk menjadi suatu realisasi.

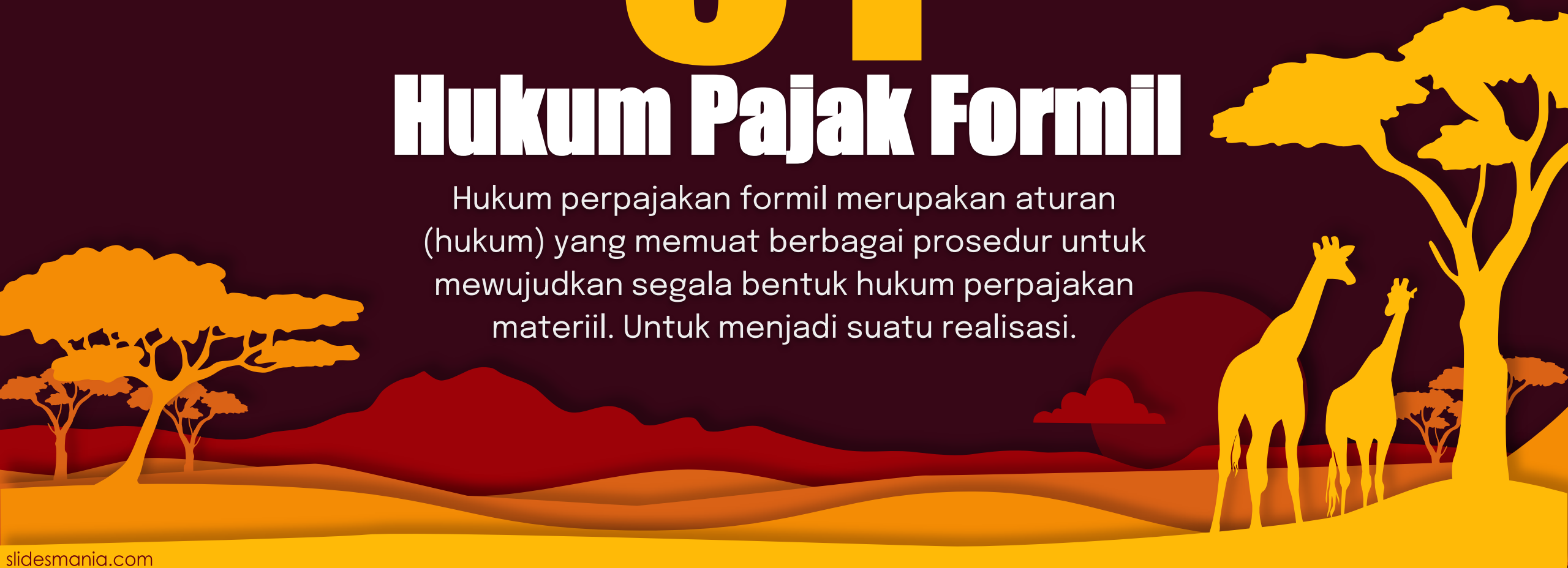

slidesmania.com

Daftar Undang-undang Pajak

- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). (Perubahan yang ketiga kalinya dari Undang-Undang Nomor 18 tahun 2000)
- UU nomor 10 tahun 2020 ini membahas mengenai bea meterai
- UU 6 TAHUN 2023, Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

slidesmania.com

Daftar Undang-undang Pajak

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Bea Materai
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

slidesmania.com

Hubungan Hukum Pajak Dengan Hukum Pidana

Hubungan antara pajak dengan hukum pidana. Adapun hubungan antara perpajakan dengan hukum pidana sangat erat serta memiliki banyak kaitan satu sama lain.

slidesmania.com

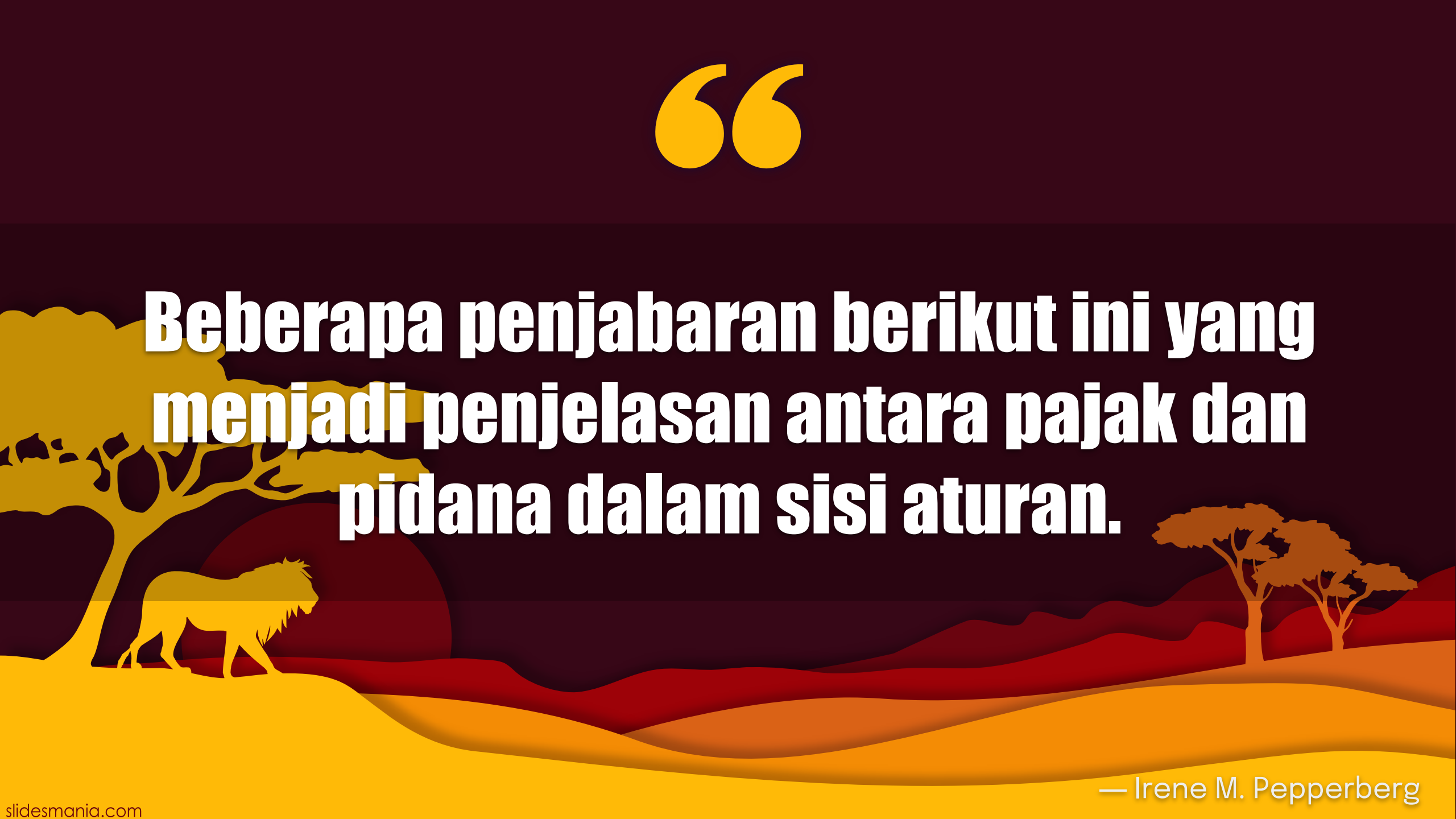
Beberapa penjabaran berikut ini yang menjadi penjelasan antara pajak dan pidana dalam sisi aturan.
— Irene M. Pepperberg
slidesmania.com

Pelanggaran Pidana Dalam Hal Pajak

- **Tax Fraud,** atau penipuan pajak adalah merupakan bentuk pelanggaran pajak yang berkaitan dengan pidana. Yakni dengan memberikan informasi pajak yang salah secara sengaja berupa manipulasi data dalam hal keuangan dengan tujuan mengecoh pihak berwenang pada perpajakan. Dalam kajian yurisdiksi maka pelanggaran berupa bentuk penipuan pajak dapat di adili dengan denda maupun pidana.

- **Tax Evasion,** Adapun Tax Evasion atau menghindari pajak. Merupakan sebuah langkah atau upaya untuk menghindari maupun mengurangi kewajiban pajak. Dalam pelaksanaannya, tindakan tersebut melibatkan pelaksanaan dan praktik yang melanggar atau ilegal. Jika langkah tersebut berupak kebohongan data maupun tindakan nyata, yang bertentangan sebagai perbuatan melawan hukum. Maka seluruh pihak yang terlibat dapat diadili dengan hukum pidana.

slidesmania.com

Pelanggaran Pidana Dalam Hal Pajak

- **Pelanggaran Ketentuan Pajak**
- Tidak melakukan pelaporan pajak sesuai waktu atau jatuh tempo dengan sengaja atau mengabaikan kewajiban. Maka hal itu mengakibatkan sanksi administratif dan perdata. Akan tetapi dalam beberapa kejadian kasusnya mengarah sebagai dasar pelanggaran tindakan pidana. Hal ini terutama melibatkan elemen penipuan maupun kelalaian yang serius.

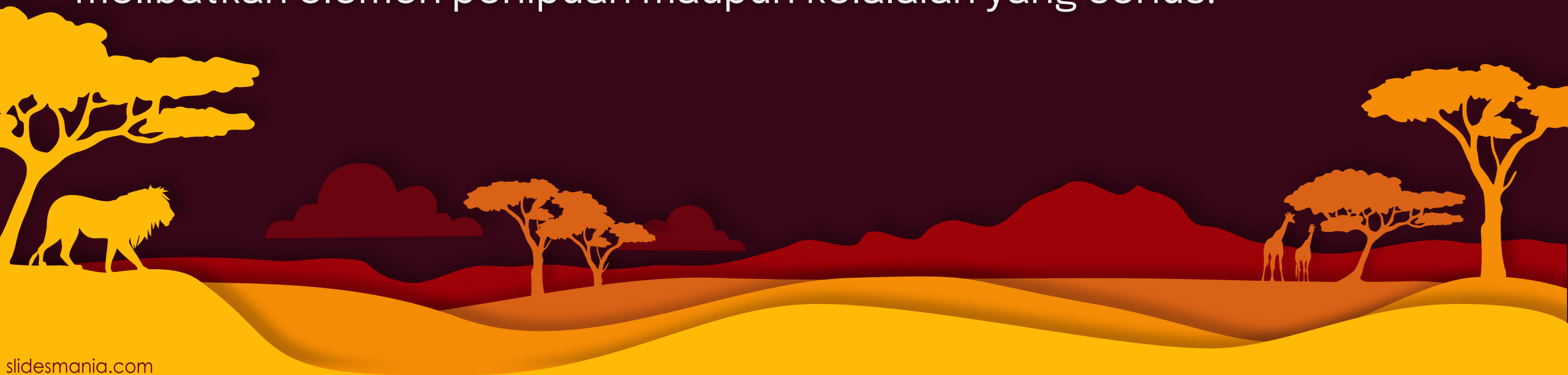

slidesmania.com

Pidana Ekonomi Dan Hukum Pajak

Terdapat yurisdiksi memiliki kaitan dengan undang-undang pidana ekonomi yang melingkupi pelanggaran hubungannya dengan pajak. Adapun Tindakan pidana hal seperti itu dapat mencakup bentuk penggelapan pajak, Money Loundring pencucian uang yang merupakan sebuah [illegible]nggaran maupun pelanggaran aturan ekonomi melibatkan pajak.

Pelanggaran Pajak Dan Hukum Perdata

This is where you section ends. Duplicate this set of slides as many times you need to go over all your sections.

slidesmania.com

Pelanggaran Perdata Dalam Hal Pajak

- **Gugatan Pada Otoritas Pajak**
- Dalam beberapa kasus, bisa mengajukan gugatan Perdata terhadap Otoritas Pajak. Yakni pada beberapa situasi, wajib pajak bisa mengajukan upaya gugatan perdata terhadap otoritas pajak. Apabila merasa hak-hak mereka terlanggar atau bilamana telah terjadi penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan dari pihak yang berwenang pajak.

- **Pengajuan Banding ke Pengadilan Perdata**
- Selanutnya, proses penyelesaian sengketa dalam hal perpajakan sering melibatkan pengajuan banding ke dalam pengadilan perdata.
- Wajib pajak yang merasa di rugikan, tidak setuju dengan segala keputusan maupun penilaian perpajakan. Melakukan pengajuan banding ke pengadilan perdata dalam rangka menyelesaikan sengketa tersebut.

slidesmania.com

Pelanggaran Perdata Dalam Hal Pajak

- **Pemulihan Pajak yang Telah Dibayar Secara Salah**
- Jika saja wajib pajak telah membayar pajak secara salah atau keliru ataupun lebih dari yang seharusnya, maka hukum perdata dapat menjadi alat untuk mengajukan klaim pemulihan pajak maupun pengembalian dana yang telah terbayarkan secara berlebihan tersebut.

- **Penyelesaian Sengketa Perdata**
- Selanjutnya, Sengketa perpajakan antara wajib pajak dengan otoritas pajak dapat terselesaikan melalui jalur hukum perdata.
- Adapun pihak yang bersengketa dapat mencari suatu penyelesaian melalui jalan mediasi atau *arbitrase*, ataupun melalui pengadilan perdata.

slidesmania.com

THANK YOU!

Abdul Haris
2022060042

slidesmania.com